



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Maret 2017

Halaman: 2

PENDAPATAN DAERAH TAK OPTIMAL Pansus Usut Laporan BPK

YOGYA (MERAPI) - Panitia khusus yang bertugas menelusuri hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 akhirnya dibentuk. Pembentukan Pansus oleh DPRD Kota Yogyakarta itu juga untuk memastikan rekomendasi BPK itu dilaksanakan Pemkot Yogyakarta.

"Target kami melihat sejauh mana rekomendasi BPK dijalankan. Rekomendasi BPK akan kami telusuri apakah sudah dijalankan," kata Ketua Pansus hasil pemeriksaan BPK, Nasrul Khoiri, usai rapat paripurna pembentukan pansus, Rabu (8/3).

Menurutnya, selama ini catatan dari BPK berulang terus menerus. Di samping itu ada temuan BPK yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Beberapa temuan yang dinilai krusial terkait pengelolaan retribusi sampah yang tidak tertib, administrasi pengelolaan pajak hotel dan restoran tidak optimal. "Ada potensi kerugian. Ini momentum penting bagi daerah untuk menelusuri agar tidak terulang. Apalagi kini dana transfer dari pusat terkoreksi dikurangi, sehingga perlu optimalisasi pendapatan daerah," terangnya.

Dicontohkan pada retribusi sampah sesuai ketentuan dalam penyetoran retribusi, harus disetorkan dulu baru dibagi hasilnya. Tapi di faktanya dibagi dulu baru disetorkan. Selain itu kendala pada pendataan wajib retribusi sampah. Selain itu pada reklame tidak berizin, selama sudah dipasang, lanjutnya, ada kewajiban menyertakan pajak.

Pansus akan mengundang BPK untuk menjelaskan lebih lanjut terhadap temuan-temuan terkait pendapatan daerah. Hal itu karena temuan BPK itu adalah laporan pendahuluan dan penyampaian utuh hasilnya baru Mei. Pansus akan bekerja selama dua bulan sebelum proses penyusunan rencana kerja tahun 2018. Dia menyatakan hasil kerja pansus juga menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun rencana kerja di tahun 2018.

Penjabat Walikota Yogyakarta Sulistiyo mendukung pembentukan Pansus karena membantu Pemkot Yogyakarta dalam menindaklanjuti catatan BPK. "Kami juga pasti akan menindaklanjuti catatan-catatan rekomendasi BPK," tandasnya.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005